

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program pendidikan nasional diharapkan dapat menjawab tantangan harapan dan tantangan yang akan dihadapi oleh anak bangsa pada masa kini maupun masa yang akan datang. Pemberlakuan UU Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah No.22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menuntut cara pandang yang berbeda dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum.

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengacu pada standar nasional pendidikan, standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar penilaian pendidikan, dari kedelapan standar isi tersebut, standar isi dan standar kompetensi lulusan merupakan acuan utama dalam pengembangan KTSP, Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan.

Pengembangan kurikulum telah dilakukan oleh sebagian satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan mengacu pada standar isi, pengembangan kurikulum tersebut perlu ditelaah untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan standar isi tersebut. Pada tahun 2005 telah dikeluarkan Permendiknas No. 22 tentang standar isi dan No. 23 tentang standar kompetensi lulusan. Selain itu dikeluarkan pula

Permendiknas No. 24 yang mengatur tentang pelaksanaan Permendiknas No. 24 yang mengatur tentang pelaksanaan Permendiknas No.22 dan No.23 berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka mulai diterapkanlah standar isi dan standar kompetensi lulusan pada beberapa sekolah di seluruh Indonesia, khususnya pada sekolah sekolah yang telah memiliki kesiapan untuk melaksanakannya.

Setelah diterapkan selama lebih kurang satu tahun, maka perlu dilakukan pemantauan atau bahkan pengkajian terhadap dokumen dan pelaksanaan standar isi, dalam kerangka itu Permendiknas No.24 telah menegaskan peranan Balitbang, Khususnya pusat kurikulum dalam kegiatan pengkajian dalam rangka pengembangan model-model kurikulum.

Dalam lampiran Permendiknas No. 22 tahun 2006 secara normative ditemukan bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. sedangkan tujuannya digariskan dengan tegas agar peserta didik dapat memiliki kemampuan sebagai berikut :

1. Berpikir secara kritis, Rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan Bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan Bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung dan tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Sementara itu ditetapkan pula bahwa kedalaman kurikulum muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai Peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum, kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan.

Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Perubahan kurikulum didasari karena hasil pembelajaran di sekolah menunjukkan ketidakmampuan siswa menghubungkan antara yang dipelajari dan bagaimana pengetahuan itu dimanfaatkan untuk memecahkan soal sehari-hari. Di sekolah siswa hanya memperoleh hapalan dengan tingkat pemahaman yang rendah.

Pendidikan di Indonesia memiliki fungsi yang mendasar dalam pembangunan bangsa dan negara, terutama dalam hal peningkatan SDM yang berkualitas serta masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri. Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan merupakan kunci sukses tercapainya tujuan nasional.

Untuk menghadapi era globalisasi yang penuh dengan persaingan dan ketidakpastian, dibutuhkan guru yang visioner dan mampu mengelola proses belajar mengajar secara efektif dan inovatif. Salah satu contoh pekerjaan guru adalah mengembangkan silabus yang selanjutnya dijabarkan ke dalam desain pembelajaran atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Desain pembelajarannya harus mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah dirumuskan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Adapun Beberapa permasalahannya di latar belakang oleh :

1. Penyusunan Program Pembelajaran

a. Silabus

- 1) Dalam penyusunan silabus ada kesulitan mencari materi karena pengembangannya terlalu luas, juga dalam menentukan metode.
- 2) Selain itu terdapat materi yang pengembangannya terlalu beraneka ragam.

b. RPP

- 1) Sangat dipengaruhi adanya sarana penunjang media, sumber buku yang ada di sekolah kemampuan guru dalam mengembangkan metode dan media.
- 2) Sarana dan prasarana untuk pengembangan RPP yang baik, kurang mendapat perhatian dari sekolah, karena PKn sekarang tidak di UN kan lagi dan menjadi pelajaran anak tiri di sekolah, sehingga sarana dan prasarana untuk pembelajaran ini juga terbatas.

2. Pelaksanaan KBM/Pembelajaran

a) jumlah jam pelajaran Pkn.

Untuk mencapai tuntutan KTSP yang mengutamakan proses disamping hasil. Materi Pkn yang begitu padat tidak cukup jika hanya dialokasikan waktu 2 jam pelajaran. Sebab jika dicermati materi PKn merupakan gabungan PPKn dan Tata Negara. Jam PPKn dulu 2 jp dan Tata Negara 6 jp. Jadi ya bagaimana dapat mengutamakan proses seperti tuntutan dalam KTSP kalau materi yang dulunya diajarkan 8jp menjadi 2 jp.

b) Penilaian afektif perlu dipertimbangkan apakah mampu seorang guru dalam melakukan kegiatan mendidik, mengajar sekaligus melakukan penilaian afektif bagi 30 lebih siswanya.

c) Pemahaman guru terhadap rumusan SK-KD

Pemahaman guru terhadap SK-KD sangat beragam, karena latar belakang pendidikan, daerah, kapasitas, dan kompetensi yang juga sangat beragam. Sehingga terkadang mengalami kesulitan untuk memahami dan memaknai SK-KD dalam implementasi pembelajaran. Kebiasaan guru yang “taken for granted” dari pusat memperlemah kreativitas dan inovasi mereka dalam mengembangkan pembelajaran.

d) Pengembangan SI PKn ke dalam Silabus dan RPP

Dalam pengembangan RPP pada umumnya tidak mengalami masalah, namun kualitasnya sangat tergantung pada dukungan sarana penunjang seperti buku-buku, media, atau daya dukung lainnya.

e) Jumlah jam pelajaran

Ada yang beranggapan bahwa PKn sekarang adalah gabungan PPKn dan Tata Negara yang jumlah jam keseluruhannya 8 jam. Sehingga untuk proses pembelajaran yang efektif tidak cukup hanya dengan 2 jam pelajaran. Ekuivalensi demikian sebenarnya tidak sepenuhnya benar, karena cakupan SK yang hanya 2 atau 3 dalam satu semester bisa disiasati agar prosesnya bisa lebih efektif.

f) Dukungan masyarakat terhadap proses pembelajaran PKn

Yang menjadi kendala di lapangan adalah kurangnya dukungan lembaga atau masyarakat di daerah saat dilakukan pembelajaran PKn dengan menerapkan model pembelajaran

praktek kewarganegaraan yang menekankan aspek outsourcing dalam menggali informasi.

g) Penilaian Pencapaian Kompetensi

Penilaian yang tidak komprehensif, padahal tuntutan penilaian PKn mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku sekaligus. Namun di sisi lain, banyak guru yang tidak mengerti bagaimana menilai aspek afektif, bagaimana mengembangkan instrument pengukurnya dan bagaimana menetapkan bobot nilainya. Sehingga hal ini perlu panduan khusus untuk mata pelajaran yang menekankan aspek sikap dan perilaku dalam standar kompetensi lulusannya. Dengan kata lain UN PKn menjadi tidak relevan atau paling tidak mendesak, meski ada keluhan mengenai pengabaian siswa terhadap mata pelajaran PKn karena tidak di UN-kan.

3. Lain - lain

a). UN PKn :

Suatu dilema dalam dunia pendidikan Indonesia, kenyataan yang terjadi di lapangan, jika masih ada pelajaran yang menjadi penentu kelulusan lewat UN, kemudian dijadikan dasar memvonis sekolah sukses atau tidak dari UN 3 mapel. Tidak ada satu sekolah pun yang mau dikategorikan sekolah yang gagal. Sehingga 3 mapel yang diunaskan tersebut bagai anak emas yang jamnya banyak, selalu ada les hanya untuk 3 mapel tersebut, bahkan beberapa minggu menjelang UN pelajarannya hanya 3 mapel tadi.

4. Ringkasan Temuan Kajian Dokumen dan Lapangan

Pembahasan terhadap temuan, baik terhadap dokumen maupun terhadap pelaksanaan Standar Isi dapat dilihat pada uraian berikut :

a) Komposisi SK – KD tiap semester

Berkait dengan beban belajar, maka komposisi jumlah SK dan KD untuk tiap semester baik untuk SMP dinilai cukup memadai. Tiap semester hanya terdiri atas 2 atau 3 SK dan tiap SK umumnya terdiri atas 2 sampai 3 KD pada SMP, kecuali pada SK tentang ketaatan pada peraturan perundangan yang terdiri atas 5 KD.

b) Komposisi KD berdasarkan ranah kompetensi PKn :

civic knowledge (kognitif=pengetahuan), *civic disposition* (afektif=nilai dan sikap), *civic skill/participation* (psikomotorik=perilaku).

Berdasarkan ranah kompetensi terdapat ketidakseimbangan ranah kompetensi PKn sebagai muatan KD untuk tiap-tiap SK di SMP. Untuk SMP hanya 9 (19,56%) KD yang membuat kandungan afeksi dan 5 (10,87%) KD perilaku, sementara untuk pengetahuan 32 (69,56%) KD

c) Tumpang tindih/overlap antar KD/SK pada kelas yang berbeda atau dengan mata pelajaran lain.

Temuan cukup banyak dalam kajian ini adalah adanya atau “anggapan ada” tumpang tindih atau overlap antara satu SK dengan SK lain atau antara satu KD dengan KD lain. Untuk SMP misalnya SK 3 dan 4 kelas VII sehingga disarankan untuk digabung. Meski demikian hal ini harus dikaji lebih matang, tetapi tetap harus menjadi perhatian.

d) Kedalaman/keluasan konsep pada masing-masing KD

Ada rumusan KD yang dianggap terlalu berat atau terlalu untuk ukuran siswa di SMP. Untuk SMP misalnya KD 2.2. 2.3., 3.1.3.3.

- a). KD 2.2. Mendeskripsikan suasana kebatinan konstitusi pertama.

Istilah semacam ini masih sangat awam bagi siswa kelas VII, Sebaiknya istilah suasana kebatinan dihilangkan saja atau dicarikan istilah yang mudah dipahami (familier). Kirakira KD tersebut berubah menjadi “Mendeskripsikan proses terbentuknya konstitusi pertama”.

- b), KD 2.3. Menganalisis hubungan proklamasi dengan UUD 1945.

Materi ini masih sangat berat untuk dikonsumsi kelas VII. Karena anak kelas VII merupakan transisi dari SD ke SMP sehingga sangat berat dituntut menganalisis hubungan pancasila dengan UUD 1945. Kalau memang harus diajarkan di kelas VII. Sebaiknya bobot kompetensi diturunkan dari “Menganalisis menjadi “Mengidentifikasi hubungan proklamasi dengan UUD 1945”.

- c). KD 3.3. Menghargai upaya perlindungan HAM.

Siswa kelas VII terasa berat dalam membuat persepsi dari kata menghargai sebaiknya diganti dengan upaya perlindungan HAM. Kata menghargai sebaiknya diganti dengan mengidentifikasi karena sulit diukur, sehingga KD berubah menjadi: “Mengidentifikasi upaya-upaya perlindungan HAM”.

- d). KD 3.1. Menguraikan hakikat, hukum, dan kelembagaan HAM.

Kata menguraikan terlalu dalam maknanya, Kata “menguraikan” sebaiknya diganti dengan mendeskripsikan, sehingga KD-nya menjadi “Mendeskripsikan hakikat hukum dan kelembagaan HAM”.

- e) Keruntutan sangat bergantung pada strategi penyajian: deduktif dan induktif. Jika mau induktif maka susunan yang disarankan sangat baik

- f) Sebuah kompetensi dasar adalah hal yang menjadi tujuan yang akan dicapai, dengan tingkat keterbacaan yang mudah maka keberhasilan untuk mencapainya akan mudah, maka kalimat yang digunakan adalah kalimat yang mudah dipahami oleh guru dan siswa.
- g) Sesuai dengan perkembangan peserta didik kelas VII, KD 2.3. harus mengalami perubahan menjadi “Mengidentifikasi hubungan proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945” dan apabila tetap dengan KD awal menganalisis hubungan proklamasi kemerdekaan dengan UUD 1945. maka guru harus memberikan batasan analisa yang dilakukan siswa yang tergambar secara jelas dalam indikator. dalam mencari sumber, memilih dan mengorganisasikan materi sesuai tuntutan KD.
- h) Kesulitan riil yang dihadapi guru utamanya adalah dalam melaksanakan pembelajaran yang kurang partisipatif melalui praktik belajar kewarganegaraan, karena kurangnya dukungan instansi dan masyarakat setempat dan dalam penilaian yang kurang komprehensif. Oleh karena itu perlu pelatihan khusus untuk itu.

Pada dasarnya kenyataan yang dihadapi di lapangan dalam mengembangkan Silabus dan RPP pada mata pelajaran PKn tidaklah mudah, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan melihat masih terdapatnya kesulitan dalam hal pengembangan materi yang terlalu luas dan mendalam, terbatasnya media, sumber buku, kemampuan guru dalam mengembangkan metode dan media, sarana dan prasarana yang terbatas serta pemahaman guru terhadap pembelajaran, untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi maka penulis melakukan penelitian ini yakni diharapkan agar sekolah dan guru juga pihak-pihak yang terdapat di dalamnya dapat lebih baik lagi dalam mengelola dan mengembangkan KBM sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang hendak penulis teliti, dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimanakah persepsi guru tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam mengembangkan Silabus dan RPP pada mata pelajaran PKn di Bandung”’.

Untuk lebih memperjelas, dirumuskan sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi Guru Pkn dalam mengembangkan Silabus dan RPP?
2. Bagaimana Prosedur yang dilakukan Guru Pkn dalam mengembangkan Silabus dan RPP?
3. Kendala-kendala apa yang dihadapi Guru Pkn dalam mengembangkan Silabus dan RPP?
4. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Guru Pkn untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam mengembangkan Silabus dan RPP?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mencoba menemukan dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah penulis rumuskan. tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi guru PKn dalam mengembangkan Silabus dan RPP?
2. Untuk mengetahui prosedur yang dilakukan guru PKn dalam mengembangkan Silabus dan RPP?
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam mengembangkan Silabus dan RPP?
4. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh guru Pkn untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam mengembangkan silabus dan Rpp?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengungkap dan menggambarkan bagaimana guru mempersepsikan kesulitan kesulitan yang dihadapi dalam mengembangkan

silabus dan RPP. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi guru Pkn dalam mengembangkan silabus dan Rpp di Sekolah serta sebagai sarana untuk memberikan sumbangan dan penerapan berupa disiplin ilmu-ilmu yang penulis terima selama mengikuti perkuliahan di jurusan Pkn Fakultas pendidikan pengetahuan sosial universitas pendidikan Indonesia di Bandung.

2. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini dapat digunakan untuk memberitahukan guru Pkn bahwa dengan diberlakukannya otonomi dalam bidang pendidikan akan membuat tiap sekolah memiliki kewenangan sendiri untuk menjalankan system pendidikannya sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan tetap diawasi oleh dinas pendidikan setempat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Persepsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1995 : 1684) memberikan arahan bahwa persepsi merupakan mental yang menghasilkan bayangan pada diri individu sehingga dapat mengenal suatu objek dengan jalan asosiasi pada suatu ingatan tertentu.

2. Guru

Menurut A. Kosasih Djahiri (1992 : 11) yang dimaksud dengan pengertian guru secara umum adalah:

Pengertian guru yang umum dikenal adalah orang yang tugas perannya mengajar: berdiri dan menyampaikan pelajaran di hadapan kelas atau sejumlah siswa dengan tugas akhir menentukan penilaian baik naik-tidak atau berhasil-tidaknya penyerapan pelajaran tersebut.

3. Silabus

Silabus dapat didefinisikan sebagai “ garis besar ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran” (Salim, 1987 : 98). Istilah silabus digunakan untuk menyebut

suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.

4. RPP

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas.

5. PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menjabarkan bahwa “PKn adalah salah satu muatan kurikulum yang wajib diberikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi”.

F. Metodologi Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang telah dirumuskan, maka secara metodologis penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu peneliti berusaha menggambarkan atau mendeskripsikan suatu kejadian atau peristiwa yang sedang berlangsung selama penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan guru PKn di lembaga pendidikan yaitu di SMP Negeri 12, SMP Negeri 16, dan SMP Negeri 1 sesuai dengan situasi yang sebenarnya.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menurut Davids Williams dalam Moleong (2005: 5) bahwa pendekatan kualitatif adalah penelitian dengan mengumpulkan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Penelitian kualitatif dimaksudkan agar peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial

tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hal ini sejalan dengan pendapat Lexy J moleong (2005:6) mengatakan bahwa:

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

G. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian utama adalah peneliti itu sendiri, Namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrument penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi literature.

1. Lembar panduan observasi

Dalam penelitian ini, lembar observasi dipergunakan untuk mengumpulkan data mengenai persepsi guru tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam mengembangkan Silabus dan RPP pada mata pelajaran PKn. Dengan adanya observasi kita akan memperoleh gambaran yang jelas tentang kesulitan yang dihadapi. Observasi akan dilakukan di SMP Negeri 12, SMP Negeri 16, dan SMP Negeri 1 Bandung.

2. Pedoman wawancara

Dalam penelitian ini pedoman wawancara digunakan untuk menjaring data berkenaan dengan pandangan dan pendapat guru tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam mengembangkan Silabus dan RPP pada mata pelajaran PKn.

3. Studi Dokumentasi

Menurut Arikunto (2005: 244) studi dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam bentuk rekaman, berupa gambar, suara, tulisan, atau lain-lain dalam bentuk rekaman biasanya dikenal dengan penelitian analisis dokumen atau analisis isi.

4. Studi Literature

Studi literature mempelajari data-data atau catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan mempelajari buku-buku untuk memperoleh informasi teoritis yang berkenaan dengan masalah penelitian. Peneliti menggunakan berbagai literature baik berupa buku maupun artikel dari media masa atau internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

H. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan keadaan objektif di lapangan. Yang dimaksud dengan teknik ini adalah bahwa data yang terkumpul akan diolah dan dihubungkan dengan masalah pokok yang kemudian akan dianalisis dan diinterpretasikan serta dideskripsikan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat.

I. Lokasi dan Subjek Penelitian

Yang menjadi lokasi dan subjek dari penelitian ini adalah :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di SMP Negeri 12, SMP Negeri 16, dan SMP Negeri 1 Kota Bandung.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu sumber yang memberikan informasi, dipilih secara purposive dan bertalian dengan purpose atau tujuan tertentu (Nasution, 1996:32). Berdasarkan pendapat tersebut maka yang menjadi subjek penelitian adalah Guru PKn.

